

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SISTEM PEMBAYARAN UPAH BURUH BONGKAR MUAT SAWIT  
DI DESA/KELURAHAN PARDOMUAN KECAMATAN  
ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN DI TINJAU MENURUT  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Penulisan Skripsi  
Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:****SABAR HASIBUAN****11425100611**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1441 H/2019 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul : *SISTEM PEMBAYARAN UPAH BURUH BONGKAR MUAT SAWIT DI DESA PARDOMUAN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH*  
yang ditulis oleh :

Nama : Sabar Hasibuan  
Nim : 11425100611  
Program Study : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding munaqasyah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 November 2019

Pembimbing Skripsi

HENRIZAL HADI, Lc, MA  
NIP : 19750715 201411 1 005

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"SISTEM PEMBAYARAN UPAH BURUH BONGKAR MUAT SAWIT DI DESA/KELURAHAN PARDOMUAN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH"** yang ditulis oleh:

Nama : **Sabar Hasibuan**  
 NIM : **11425100611**  
 Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Kamis, 26 Desember 2019**  
 Waktu : **13.30 WIB**  
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Desember 2019

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Wahidin, M.Ag**

Sekretaris  
**Nuryanti, SE., M.Sy**

Penguji I  
**Ahmad Fauzi, SHL., MA**

Penguji II  
**Bambang Hermanto, M.Ag**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**  
 NIP. 19580712 1986031 005

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sabar Hasibuan  
 NIM : 11425100611  
 Tempat/Tgl.Lahir : Sisundung, 17 Maret 1995  
 Jurusan/Semester : Ekonomi Syariah/XI  
 Alamat : Jl. Taman Karya  
 Lulus Munaqasah : 26 Desember 2019  
 Judul : Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat  
 Sawit Di Desa/Kelurahan Pardomuan Kecamatan  
 Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan  
 Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil plagiat maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh Akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan akal sehat.

Pekanbaru, 14 Januari 2020



*(Signature)*

**Sabar Hasibuan**  
 NIM. 11425100611

UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**SABAR HASIBUAN (2019) : Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit di Desa/Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah**

Latar belakang dalam penelitian adalah bahwa salah satu desa yang ada di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah desa/kelurahan Pardomuan, berdasarkan observasi bahwa kebanyakan masyarakat bekerja sebagai petani sawit. Selain dari bekerja sebagai petani sawit di desa/kelurahan Pardomuan ini juga terlihat beberapa aktivitas kerja yaitu buruh bongkar muat sawit. Seharusnya upah diberikan tepat waktu, adil. Namun, fenomena yang dijumpai terkadang tidak sesuai upah yang diberikan dengan hasil kerja yang sudah dilakukan. Sementara bongkar muat dilapangan sering terjadi dua kali muat kedalam truck untuk ditimbang ke pabrik. Maka dirumuskan masalah, bagaimana pelaksanaan pembayaran upah buruh bongkar muat sawit di Desa/Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sistem pembayaran upah buruh bongkar muat sawit di Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Populasi dalam penelitian adalah buruh bongkar muat sawit sebanyak 30 orang dengan teknik *total sampling*. Dan 10 orang toke diambil 4 orang dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Kemudian dianalisa menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian pelaksanaan sistem pembayaran upah pada buruh bongkar muat sawit di desa/kelurahan pardomuan kecamatan angkola selatan kabupaten tapanuli selatan kabupaten tapanuli selatan, dari segi upah sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Jawaban yang mengatakan iya sebanyak 25 orang atau 83%, namun terkadang sistem pembayaran upah masih kurang tepat waktu karena masih ada tanggapan responden yang mengatakan tidak tepat waktu sebanyak 10 orang atau 33%. Adapun tinjauan ekonomi syariah tentang sistem pembayaran upah yang berlaku pada buruh bongkar muat sawit di Desa/Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan kesesuaian upah dengan tenaga yang dikeluarkan sudah sesuai dengan tinjauan Ekonomi Syariah. Namun pembayarannya belum sepenuhnya tepat waktu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Atas rahmat taufiq serta hidayah-Nya serta yang telah menciptakan alam semesta, seiring dengan itu shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah di utus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Islamiyah-Nya kepada segenap ummat di jagat raya ini sebagai hidayah dan *Irsyadah* yang dapat menjamin kebahagiaan hidup ummat manusia di dunia dan *uhkrawi*.

Dengan rahmat dan karunia Allah dan diiringi dengan ketekunan serta kesabaran dan bantuan dari semua pihak yang berkompeten, maka penulis dapat menyusun skripsi dengan judul: **“SISTEM PEMBAYARAN UPAH BURUH BONGKAR MUAT SAWIT DI DESA/KELURAHAN PARDOMUAN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”**

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, kejanggalan-kejanggalan, baik dari segi sistematika, materi, bahasa, dan segala apa yang perlu dipenuhi dalam penulisan karya ilmiah. Memang tak ada gading yang tak retak dan tidak ada manusia yang tidak khilaf dan alfa. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Teristimewa kepada Ayahanda Ahmad Hasibuan dan Ibunda Masrida Harahap tercinta, terimakasih yang sebesar-besarnya atas do'a dan dukungan, kasih sayang, serta keikhlasan dan perjuangan baik secara materi maupun non materi dalam mendampingi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada keduanya.

2 Prof.Dr. H. Ahkmad Mujahidin, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3 Wakil Rektor 1, 2 dan 3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4 Bapak Dr. Drs, H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin M.Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

6. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada penulis.

Bapak Henrizal Hadi, Lc,MA selaku pembimbing penulis yang telah memberikan motivasi dan bimbingan terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bunda Nurhasanah, SE, MM selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak H. Maswat selaku Kepala Desa/Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan dan seluruh jajaran.

10. Karyawan/I Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan.

11. Kepada kakak Karlina Sari dan adik Ronaldi Hasibuan juga Anggi Saputra yang selalu memberikan support dan semangatnya kepada penulis.

12. Sahabat penulis Badrul Ihsan, SE., Agus Setiawan, SE., Alfi Bustal., Wahyudi dan Abdul Rasyid MZ yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan sahabat lain yang takmungkin disebutkan satu per-satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfa'at bagi pembacanya. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 1 November 2019

Penulis

UIN SUSKA RIAU

**SABAR HASIBUAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                    | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                              | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                  | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                               | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                |             |
| A. Latar Belakang.....                                  | 1           |
| B. Batasan Masalah.....                                 | 7           |
| C. Rumusan Masalah.....                                 | 7           |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                   | 7           |
| E. Metode Penelitian.....                               | 8           |
| F. Indikator Penelitian.....                            | 10          |
| G. Sistematika Penulisan .....                          | 11          |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>           |             |
| A. Geografi dan demografi desa pardomuan.....           | 12          |
| B. Struktur Pemerintahan Desa/Kelurahan Pardomuan ..... | 18          |
| C. Visi dan Misi Desa Pardomuan .....                   | 18          |
| D. Potensi Pertanian Desa Pardomuan .....               | 18          |
| <b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>                        |             |
| A. Sistem Pembayaran Upah.....                          | 20          |
| 1. Pengertian Sistem .....                              | 20          |
| 2. Pengertian Pembayaran .....                          | 21          |
| 3. Pengertian Upah .....                                | 21          |
| 4. Tenaga Kerja.....                                    | 24          |
| B. Upah .....   | 25          |
| 1. Indikator Upah.....                                  | 25          |
| 2. Dasar hukum Upah .....                               | 27          |
| 3. Syarat Pelaksanaan Upah.....                         | 30          |
| 4. Perbedaan Tingkat Upah .....                         | 32          |

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |    |
|---|----|
| 5. Sistem Pembayaran Upah.....            | 35 |
| C. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah .....      | 38 |
| D. Upah Menurut Ekonomi Islam .....       | 39 |
| 1. Makna Keadilan Dalam Pengupahan .....  | 39 |
| 2. Makna Layak Dalam Pengupahan .....     | 41 |
| 3. Makna Kebajikan Dalam Pengupahan ..... | 42 |

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

|  |    |
|--|----|
| A. Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit Di Desa<br>Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli<br>Selatan .....                                | 46 |
| B. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem Pembayaran Upah<br>Buruh Bongkar Muat Sawit Di Desa Pardomuan Kecamatan<br>Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan ..... | 59 |
| 1. Anjuran Bekerja.....  | 59 |
| 2. Pembayaran Tepat Waktu.....   | 60 |
| 3. Kesesuaian Upah Dengan Tenaga .....   | 61 |

#### BAB VI PENUTUP

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 61 |
| B. Saran .....      | 62 |

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

#### BIOGRAFI PENULIS



## DAFTAR TABEL

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Tabel 1.1  | Indikator Upah.....  | 10 |
| Tabel 2.1  | Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....   | 14 |
| Tabel 2.2  | Klasifikasi Penduduk Menurut Agama .....   | 15 |
| Tabel 2.3  | Klasifikasi Penduduk Menurut Usia Tenaga Kerja.....  | 15 |
| Tabel 2.4  | Bangunan Fasilitas Umum .....  | 17 |
| Tabel 2.5  | Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencarian .....  | 17 |
| Tabel 2.6  | Kelompok Tani Desa Pardomuan .....   | 19 |
| Tabel 4.1  | Tanggapan Responden Tentang Apakah Upah Yang Diterima Sama Setiap Bulan .....                                | 48 |
| Tabel 4.2  | Tanggapan Responden Tentang Apakah Upah Yang Diberikan Dapat Membantu Perekonomian Keluarga .....            | 49 |
| Tabel 4.3  | Tanggapan Responden Tentang apakah Upah Yang Diterima Tepat Waktu .....                                      | 50 |
| Tabel 4.4  | Tanggapan Responden Tentang Sudah Berapa Lama Bapak/Ibu Bekerja Sebagai Bongkar Muat Sawi.....               | 50 |
| Tabel 4.5  | Tanggapan Responden Tentang Apakah Ada Tambahan Bonus Yang Mereka Terima .....                               | 51 |
| Tabel 4.6  | Tanggapan Responden Tentang Apakah Upah Yang Diterima Sesuai Kesepakatan Awal .....                          | 52 |
| Tabel 4.7  | Tanggapan Responden Tentang Apakah Ada Perbedaan Upah Antara Karyawan Yang Satu Dengan Yang Lainnya.....     | 53 |
| Tabel 4.8  | Tanggapan Responden Tentang Apakah Upah Yang Diterima Sesuai Dengan Banyaknya Sawit Yang Dibongkar Muat..... | 54 |
| Tabel 4.9  | Tanggapan Responden Tentang Apakah Upah Yang Diterima Dapat Membayar Upang Sekolah Anak.....                 | 54 |
| Tabel 4.10 | Tanggapan Responden Tentang Apakah Ada Potongan Upah Yang Diberikan Oleh Pemilik Sawit.....                  | 55 |

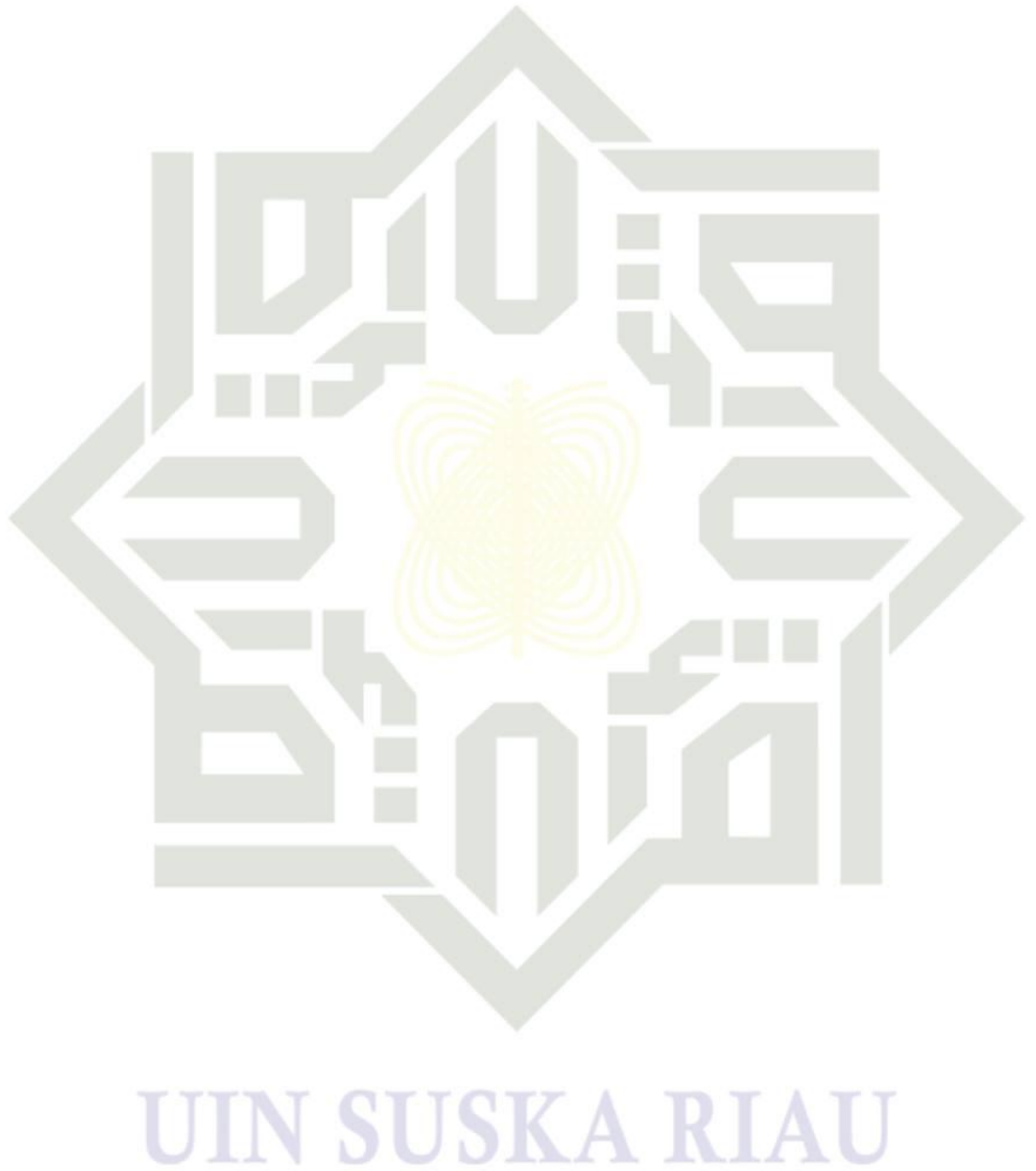


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

|             |  |    |
|-------------|--|----|
| Gambar II.I | Struktur Organisasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Pardonuan..... | 18 |
|-------------|--|----|



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Sistem pembayaran upah harus jelas sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga, tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian kalau ternyata sudah diperjanjikan, maka harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.

Pengertian upah, dalam bahasa Arab upah disebut dengan *Al-Ijarah*, yang berasal dari kata *Al-Ijarah* yang berarti *Al-Ajru* (ganti). Dari sebab itu *Ats-Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian *Syara'*, *Al-Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil mamfaat dengan jalan penggantian (upah)<sup>1</sup>. Dalam kamus bahasa indonesia upah adalah uang dan sebagian yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu<sup>2</sup>.

Menurut dewan penelitian perupahan nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut menurut suatu

<sup>1</sup> Said Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid1 Ahli Bahasa H.Kamaluddin A. Marsuki (Bandung :Alma'arif, 1988), Cet ke-1, h 15.

<sup>2</sup> .Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 947.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.

Batasan tentang upah menurut dewan penelitian pengupahan adalah sebagai berikut: “upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.”<sup>3</sup>

Dalam Undang Undang Ketenaga Kerjaan (pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 tahun 2003) disebutkan bahwa “upah adalah hak buruh/pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh/pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi buruh/pekerja dan keluarganya atas suatu pekerja dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Quran maupun sunnah Rasul.<sup>4</sup> Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadikan kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini,

<sup>3</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital dari Teori ke Praktek Menajmen Sumber Daya Islami*, (Jakarta : Rajawali pers, 2009), h. 799.

<sup>4</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Pinar Grafika, 2004), h. 157

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam memberi pedoman kepada pihak mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal yaitu adil dan mencukupi.

Dalam surat At-Taubah menjelaskan definisi upah yang seharusnya dilakukan dalam Islam.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Proses pemenuhan upah yang Islami berasal dari dua faktor yaitu objektif dan subjektif. Objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah dipasar tenaga kerja. Sedangkan subjektif, upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah dipasar tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula.<sup>5</sup>

Efisiensi upah merupakan sebuah teori yang menghubungkan antara produktivitas dan efisiensi upah. Secara lebih jelasnya, upah yang tinggi akan diberikan oleh perusahaan kepada pekerja asalkan perusahaan mendapat kualitas pekerjaan yang lebih baik. Dengan upah yang lebih tinggi ini, pekerja

<sup>5</sup> Opcit, hlm. 74

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya memberikan kualitas pekerjaan yang lebih baik, namun juga akan menurunkan tingkat pergantian karyawan.<sup>6</sup>

Upah dapat digolongkan menjadi 2:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
2. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*), adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.<sup>7</sup>

Desa/Kelurahan Pardomuan terletak di wilayah Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Desa/Kelurahan Pardomuan adalah salah satu dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Angkola Selatan yang berpotensi dibidang pertanian dan perkebunan. Ditinjau dari jenis mata pencaharian pokok masyarakat Desa Pardomuan secara umum kegiatan ekonomi bergerak disektor pertanian dengan profesi sebagai petani sawit dan karet.<sup>8</sup>

Desa/Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan masyarakatnya juga melakukan kegiatan yang sama, yaitu sistem pembayaran upah bongkar muat sawit. Masyarakat Desa Pardomuan sebagian bekerja sebagai buruh. Pada umumnya mereka melakukan kegiatan

<sup>6</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 208

<sup>7</sup> Opcit, hlm. 230

<sup>8</sup> Himsar Siregar, Kepala Lingkungan 4, Wawancara, Pardomuan, 22 Oktober 2018



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem pembayaran upah bongkar muat sawit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagainya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ali Mukti Ritongan sebagai salah seorang toke sawit ia mengatakan bahwa sistem pengupahan buruh bongkar muat sawit dengan cara melaksanakan pekerjaan dalam hitungan jumlah berat sawit yang ditimbang perminggu.

1. Menimbang dan memuat sawit dengan menggunakan tenaga manusia dengan upah tergantung jumlah ton yang dikerjakan oleh buruh bongkar muat tersebut dan waktunya tergantung adanya sawit dilapangan. Jumlah upah sebesar Rp 30.000/ton.
2. Bongkar sawit digudang penumpukan sawit apabila melebihi muatan dan upahnya sudah termasuk dari menimbang dan memuat sawit kedalam truck sebesar Rp 30.000/ton.<sup>9</sup>

Adapun dampak positif bagi buruh yang melakukan sistem pembayaran upah bongkar muat sawit dengan sistem borongan merasa terbantu sebab dari hasil upah bongkar muat sawit dapat membantu perekonomian keluarga. Sedangkan dalam segi sosial para buruh bongkar muat sawit dapat mempererat hubungan silaturahmi antara buruh dengan masyarakat lainnya.

Berdasarkan observasi dilapangan ditemukan fenomena yang terjadi pada saat sistem pembayaran upah bongkar muat sawit setiap harinya, terkadang dalam satu hari dua kali bongkar muat sawit akan tetapi cuma sekali saja dalam pembayaran upahnya. Maksud dua kali bongkar muat setelah dimuat dilapangan lalu dibongkar digudang penimbangan (dekat rumah toke

<sup>9</sup> Ali Mukti Ritonga (Toke Sawit), Wawancara, Pardomuan Tanggal 22 Oktober 2018

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sawit) kemudian buah masyarakat yang masih berada dilapangan di muat kembali untuk diantarkan kefabrik keesokan harinya. Setelah itu buah yang sudah dibongkar dekat rumah toke tadi dimuat kembali dan diantarkan kefabrik. Sehingga akibat dua kali bongkar muat sawit buruh tidak merasa mencukupi upah yang akan diterima dengan satu kali upah saja.

Tetapi permasalahan yang terjadi pada buruh bongkar muat sawit Desa/Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah tidak sesuainya upah yang diberikan dengan hasil kerja yang sudah dilakukan. Sementara bongkar muat dilapangan sering terjadi dua kali muat kedalam truck untuk ditimbang kefabrik.

Sedangkan Upah menurut prinsip Islam, bahwa dalam penentuan upah, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dari tenaga kerja. Oleh sebab itu Islam tidak membenarkan penetapan upah yang tidak memperhatikan tenaga kerja, yaitu bertujuan hanya untuk mensejahterakan tenaga kerja semata. Di sisi lain pihak produsen atau majikan juga diperhatikan kesejahteraannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang sistem pembayaran upah, dengan judul : **“SISTEM PEMBAYARAN UPAH BURUH BONGKAR MUAT SAWIT DI DESA/KELURAHAN PARDOMUAN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”**

---

<sup>10</sup> Op. Cit., h.76.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **Batasan Masalah**

Agar penulisan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersiapkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan sistem pemabayaran upah buruh bongkar muat sawit pada Desa/Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan ditinjau menurut Ekonomi Syariah.

### **Rumusan Masalah**

Sejalan dengan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas maka pokok permasalahan akan di teliti dalam pembuatan karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembayaran upah buruh bongkar muat sawit di Desa/Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sistem pembayaran upah buruh bongkar muat sawit di Desa/Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem pembayaran upah bongkar muat sawit di Desa/Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sistem pembayaran upah buruh pada bongkar muat sawit di Desa/Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis sendiri merupakan suatu penambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman kerja di lapangan secara langsung.
- b. Bagi para buruh bongkar muat sawit hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi salah satu referensi.
- c. Sebagai bahan referensi bagi pengembangan Ekonomi Syariah, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pembayaran upah buruh yang berlaku pada masyarakat Desa/Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata satu (S1) pada jurusan ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah buruh dan pemilik (toke sawit). Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sistem pembayaran upah buruh bongkar muat sawit di Desa Pardomuan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang diambil sampel 4 orang dengan metode *purposive sampling* dan buruh sebanyak 30 orang. Semua dibedakan sampel dengan metode *total sampling*.<sup>11</sup>

### 4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya langsung.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau sumberdata pelengkap yang berfungsi sebagai pelengkap data-data yang diperlukan oleh data primer.<sup>12</sup>

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki.<sup>13</sup>
- b. Angket, yaitu menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden sekaligus menyediakan alternatif jawaban.
- c. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang melakukan kegiatan pembayaran upah buruh bongkar muat sawit

<sup>11</sup> Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 189

<sup>12</sup> *Ibid.*, 212

<sup>13</sup> Tukiran Taniredja, Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 47

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dokumentasi, yaitu penulis menelaah dan mengumpulkan data dari buku-buku ataupun dari tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

### 6. Metode Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu analisa data yang bersifat penjelasan dari data-data dan informasi yang didapat dari lapangan kemudian dikaitkan dengan teori-teori dari konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dimana penjelasan ini menggunakan metode kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Angka Persentase

F : Frekuensi

N : Jumlah Frekuensi/banyaknya individu<sup>14</sup>

### Indikator Penelitian

Adapun indikator dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 1.1**  
**Indikator Upah**

| No | Variabel  | Indikator   |
|----|---|---|
| 1. | Sistem pembayaran upah adalah suatu ide yang telah ditetapkan sebagai sarana untuk pemabalasan jasa atau pembayaran tenaga yang sudah di dikeluarkan untuk mengerjakan suatu hal. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lamanya kerja</li> <li>2. Banyaknya produk yang dihasilkan</li> <li>3. Lamanya dinas</li> <li>4. Berdasarkan kebutuhan</li> </ol> |

<sup>14</sup> M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Statistik 1*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami hasil penulisan ini, maka penulis membuat suatu sistem penulisan yang dibagi atas beberapa bab sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Meliputi geografi dan demografi, pendidikan, pencaharian penduduk, sarana dan prasarana serta adat istiadat desa Pardomuan.

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Terdiri dari pengertian upah, tenaga kerja, dasar hukum upah tenaga kerja, syarat-syarat pelaksanaan upah, perbedaan tingkat upah, sistem pembayaran upah, upah menurut Islam, keadilan dalam pengupahan, upah dalam pelaksanaan ibadah.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Terdiri dari sistem pembayaran upah buruh bongkar muat sawit, tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem pembayaran upah buruh bongkar muat sawit di desa Pardomuan.

**BAB V : PENUTUP**

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### Geografi dan Demografi Desa/Kelurahan Pardomuan

##### 1. Geografi

Desa/Kelurahan Pardomuan merupakan bagian dari wilayah yang berada dibawah Kecamatan Angkola Selatan. Sedangkan Kecamatan Angkola Selatan masih berada di bawah kekuasaan Kabupaten Tapanuli Selatan yang berada di Padang Sidimpuan Kota dan Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri masih berada di bawah kekuasaan Propinsi Sumatra Utara dengan ibukotanya Medan.<sup>15</sup>

Desa/Kelurahan Pardomuan mempunyai luas wilayah lebih dari 30.000 hektar. Desa/Kelurahan Pardomuan juga berdekatan dengan desa yang berada di sekitar wilayahnya sehingga mempunyai batas-batas desa yang berdekatan dengannya. Pada bagian timur desa Pardomuan berbatasan dengan Desa Mosa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Singkuang, sebelah barat berbatasan dengan desa Raniate, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Sihuk-huik.<sup>16</sup>

Wilayah Desa/Keluraha Pardomuan dengan kondisi topografi sebagian besar pegunungan dan sangat terjal, namun disebelah barat relative datar, dan ada 1 (satu) buah sungai yang membelah desa pardomuan yaitu sungai Batang Salai. Ketinggian tanah dari permukaan

<sup>15</sup> Buku Profil Kantor Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2017 h. 22

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 32

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laut kurang lebih 250 sampai 300 m. Keadaan cuaca di Desa Pardomuan memiliki keadaan cuaca baik musim hujan ataupun musim kemarau. Adapun musim hujan ataupun kemarau yang terjadi biasanya lebih sering musim panas dari pada musim hujan.

Jenis tanah Desa Pardomuan, desa tersebut mempunyai jenis tanah yang prokdisolik, tekstur. Pada umumnya tanahnya berbentuk tanah kering hal ini memang yang paling banyak di daerah sumut, sedangkan warna tanahnya kebanyakan berwarna hitam kuning dan kesuburan tanahnya bersifat organik.

Bila diperhatikan keadaan tanah di Desa Pardomuan tergolong sangat subur, sebab kebanyakan tanah berbentuk subur dengan warna tanah hitam, sedangkan kadar keasaman tanahnya tidak terlalu tinggi hanya sekitar 5,6 samapai 6,5% saja.<sup>17</sup>

Orbitasi (jarak desa dengan tempat lain) desa Pardomuan daerah yang terdekat adalah berjarak kurang lebih 4 km adapun jarak pemerintah Ibukota Kecamatan Angkola Selatan yang terletak di Desa Napa adalah berjarak lebih kurang 20 km, dengan jarak Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan yang berada di Padangsidimpuan kota berjak lebih kurang 60 km, dan jarak Ibukota Provinsi yang berada di Medan sekitar lebih kurang 393 km, dan jarak desa tersebut ke kota pekan baru sekitar lebih kurang 262 km.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 34

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 35



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari jarak diatas dapatlah kita ketahui bahwa pemerintah Desa Pardomuan lebih dekat dengan Ibukota Provinsi lain dari pada Ibukota sendiri.

## 2. Demografi

Masyrakat Desa Pardomuan mayoritas para warganya asli Tapsel, mereka sebahagian adalah orang-orang yang miskin dan sulit mendapatkan perokonomian yang layak, disamping itu karena penduduknya masih mengelola perokonomian, untuk mengetahui penduduknya dapatlah penulis paparkan dengan tabel-tabel berikut ini :<sup>19</sup>

**Tabel. 2.1**  
**Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

| No | Jenis kelamin | Jumlah | Persentase |
|----|---------------|--------|------------|
| 1  | Laki-laki     | 1575   | 48,31 %    |
| 2  | Perempuan     | 1685   | 51,69%     |
|    | Jumlah        | 3260   | 100%       |

Sumber Data : Dari Kepala Desa/Kelurahan Pardomuan 2018

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa penduduk desa tersebut dilihat dari jenis kelaminnya, lebih banyak mereka yang perempuan dari yang laki-laki, hal itu dapat dilihat dari tabel diatas dimana dari jumlah seluruh penduduk desa 3260 jiwa, mereka laki-laki berjumlah 1575 jiwa atau diambil persentase 48,31%. Sedangkan penduduk perempuan bila dilihat tabel diatas berjumlah 1685 jiwa atau dilihat dari persentase 51,69%. dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak begitu jauh, hanya sekitar 110 jiwa.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Ibid. h. 36

<sup>20</sup>. Buku Profil Kantor Kelurahan/Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2017-2018

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel. 2.2**  
**Klasifikasi Penduduk Menurut Agama**

| No | Agama      | Jumlah | Persentase |
|----|------------|--------|------------|
| 1  | Islam      | 1141   | 35%        |
| 2  | Non-muslim | 2119   | 65%        |
|    | Jumlah     | 3260   | 100%       |

Sumber Data : Kantor kepala Desa/Kelurahan Pardomuan tahun 2018

Berdasarkan dari tabel diatas bahwa klasifikasi penduduk menurut agamanya, lebih banyak mereka yang beragama non-muslim dari pada yang beragama islam, hal itu dapat dilihat dari tabel diatas dimana dari jumlah seluruh penduduk desa 3260 jiwa, mereka yang beragama non muslim berjumlah 2119 jiwa atau dilihat dari persentasenya 65%, sedangkan penduduk yang beragama Islam berjumlah 1141 jiwa atau dilihat dari persentasenya 35%. Dari keterangan diatas dapat diketahui selisih persentase agamanya yaitu 30%.

**Tabel. 2.3**  
**Klasifikasi Penduduk Menurut Usia Tenaga Kerja**

| No | Usia  | Jumlah | Presentase |
|----|-------|--------|------------|
| 1  | 20-29 | 265    | 26%        |
| 2  | 30-39 | 348    | 34%        |
| 3  | 40-49 | 172    | 17%        |
| 4  | 50-59 | 137    | 13%        |
| 5  | 60+   | 113    | 10%        |
|    |       | 1035   | 100%       |

Sumber Data : Kantor kepala Desa/Kelurahan Pardomuan tahun 2018

Dari tabel tiga diatas bahwa penduduk Desa Pardomuan menurut usia tenaga kerja berjumlah 348 orang, dimana kalau dilihat dari jumlah penduduk keseluruhan 1035 penduduk ternyata mereka yang bekerja lebih sedikit dibandingkan mereka yang tidak bekerja, sehingga dari 1035 penduduk yang tidak bekerja terdapat 687 penduduk.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dari tabel II.3 dapat diketahui juga bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia tenaga kerja paling banyak mereka yang berusia antara 30-39 tahun berjumlah 348 atau sekitar 34% kemudian mereka yang berusia 20-29 tahun berjumlah 265 atau 26%, mereka yang berusia 40-49 tahun berjumlah 172 atau 17%, mereka yang berusia 50-59 tahun berjumlah 137 atau 13%, dan yang berusia diatas 60 tahun berjumlah 113 atau 10%. Ternyata bila dilihat dari persentase mereka yang berusia antara 30-39 tahun lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu berjumlah 348 atau 34% dari keseluruhan tenaga kerja.<sup>21</sup>

### 3. Sarana dan Prasarana

Seperti halnya dengan Desa yang lainnya di Desa Pardomuan juga terdapat sarana dan prasarana. Diantara prasarananya adalah ; jalan poros yang terdapat di desa sejauh kurang lebih 40 km, jalan penghubung sejauh lebih kurang 15 km, jalan desa berjarak lebih kurang 5 km, dan jalan kebun berjarak lebih kurang 65 km. Itulah prasarana jalan yang terdapat di Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan.<sup>22</sup>

Kemudian dari pada itu di Desa Pardomuan juga terdapat beberapa fasilitas umum, hal itu dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

---

<sup>21</sup>. *Ibid.* h. 37

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 45



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel. 2.4**  
**Bangunan Fasilitas Umum**

| No | Jenis Bangunan        | Jumlah  |
|----|-----------------------|---------|
| 1  | Kantor Unit Pemukiman | 1 Buah  |
| 2  | Kantor Lurah/Desa     | 1 Buah  |
| 3  | Balai Pengobatan      | 2 Buah  |
| 4  | Pos Kamling           | 4 Buah  |
| 6  | Mesjid                | 3 Buah  |
| 7  | Gereja                | 3 Buah  |
| 8  | Sarana pendidikan     | 2 Buah  |
|    | Jumlah                | 16 Buah |

Sumber Data : Kantor kepala Desa/Kelurahan Pardomuan tahun 2018

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa di Desa/Kelurahan Pardomuan juga terdapat beberapa fasilitas umum yang terdapat, dimana dari tabel diatas 1 buah kantor unit pemukiman, kantor lurah/desa 1 buah, balai pengobatan 2 buah, balai pos kamling 4 buah, masjid 3 buah masjid, gereja 3 buah, dan 2 buah sarana pendidikan terdiri dari SD dan SMP. Sehingga bila di jumlahkan fasilitas bangunan umum yang terdapat di desa Runding terdapat sebanyak 16 buah.

**Tabel. 2.5**  
**Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

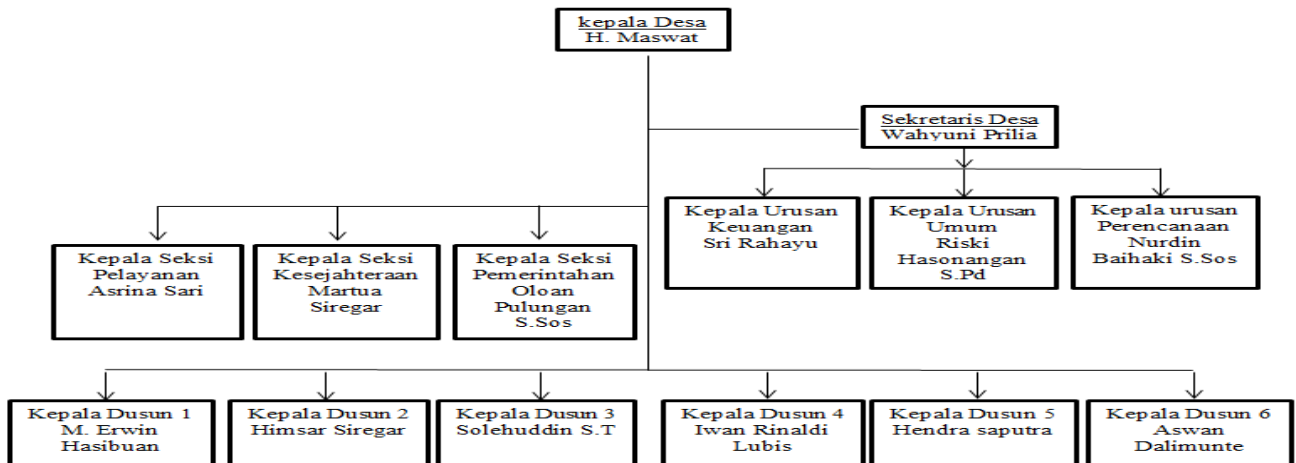
| No | Mata Pencaharian | Jumlah     |
|----|------------------|------------|
| 1  | Petani           | 1035 Orang |
| 2  | Pedagang         | 32 Orang   |
| 3  | PNS              | 4 Orang    |
| 4  | Buruh            | 30 Orang   |
| 5  | Pegawai Swasta   | 24Orang    |
| 7  | Pensiunan        | 4 Orang    |
|    | Jumlah           | 1129 ORANG |

Sumber data : Arsip kantor kepala Desa/Kelurahan Pardomuan tahun 2018

Dari data tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan keragaman mata pencaharian masyarakat setempat sebagian besar diantaranya bergerak dibidang pertanian dan perdagangan.

## Struktur Pemerintahan Desa/Kelurahan Pardomuan

**Gambar II.I**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan**  
**Desa/Kelurahan Pardomuan**



## C. Visi dan Misi Desa Pardomuan

### Visi

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera

### Misi

1. Selalu dalam penampilan, bersih indah, indah, dan nyaman.
2. Ekonomi produktif untuk membangun kekuatan ekonomi ummat .
3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun.
4. Melakukan yang terbaik dalam pelayanan terhadap masyarakat.

## Potensi Pertanian Desa Pardomuan

Desa Pardomuan merupakan salah satu desa yang lahan pertaniannya yang luas di kecamatan Angkola Selatan dimana letak geografisnya yang sangat mendukung.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Pardomuan memiliki potensi lahan yang sangat besar untuk pengembangan pertanian. Yang luas lahan pertanian 30.000 h. masyarakat desa Pardomuan sebagian besar berprofesi sebagai petani, komoditas utama yang diusahakan adalah berkebun sawit, terdapat beberapa fasilitas pendukung diantaranya berdampingan dengan pabrik sawit PT. ANJ AGRI SIAIS, didukung dengan lahan yang subur, dan hasil panen dapat dilakukan 2 (dua) minggu sekali.<sup>23</sup>

Pertanian di desa Pardomuan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang bergabung dalam beberapa lembaga petani :

**Tabel. 2.6**  
**Kelompok Tani Desa Pardomuan**

| No | Nama Kelembagaan | Jenis Kelembagaan | Bidang Usaha |
|----|------------------|-------------------|--------------|
| 1  | Janji Matogu     | Kelompok Tani     | Tani Sawit   |
| 2  | Bina Sari        | Kelompok Tani     | Tani Sawit   |
| 3  | Dolok Manunggal  | Kelompok Tani     | Tani Sawit   |
| 4  | HTI              | Kelompok Tani     | Tani sawit   |
| 5  | Laba Lasiak      | Kelompok Tani     | Tani Sawit   |

<sup>23</sup> Ibid. h. 87



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### Sistem Pembayaran Upah

##### 1. Pengertian Sistem

Secara umum, sistem dapat didefinisikan sebagai sekumpulan objek, ide, berikut saling keterkaitannya (inter-relasi) didalam (usaha) mencapai suatu tujuan (atau sasaran bersama tertentu). Atau dengan kata lain, sistem dapat disebutkan sebagai kumpulan komponen (sup-sistem fisik maupun non-fisik atau logika) yang saling berhubungan satu sama lainnya dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan.<sup>24</sup>

Menurut Fat, sistem adalah suatu himpunan suatu “benda” nyata atau abstrak (a set of thing) yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan (Unity) untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.<sup>25</sup>

Dengan demikian Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur- prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Eddy Pharasta, *Sistem Informasi Geografis: Konsep-konsep Dasar (Prespektif Geodesi & Geomatika)*, (Bandung: Informatika Bandung, 2009), Hlm. 89

<sup>25</sup> Hutahaeen , Jeperson, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), Hlm. 1

<sup>26</sup> Hutahaeen , Jeperson, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), Hlm. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengertian Pembayaran

Pembayaran adalah berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang atau dana dari pembayar kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan.

Menurut (Hidayati,2013) pembayaran adalah mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kebutuhan ataupun kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi.

## 3. Pengertian Upah

Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja, bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Pada saat sekarang ini sangat banyak macam pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keahlian masing-masing. Apapun bentuk pekerjaan dapat dilakukan seseorang asalkan tidak menyalahi syari'at Islam. Salah satu pekerjaan yang dilakukan masyarakat yaitu menjadi petani di desa runding dan melakukan pembayaran upah dengan hasil yang dikerjakannya.

Dalam bahasa Arab upah di sebut dengan *Al-Ijarah*, yang berasal dari kata *Al-Ijarah* yang berarti *Al-Ajru* (ganti). Dari sebab itu *Ats-Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian *Syara'*, *Al-Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (upah)<sup>27</sup>. Dalam kamus bahasa Indonesia upah adalah uang

<sup>27</sup> Said Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid1 Ahli Bahasa H.Kamaluddin A. Marsuki, (Bandung: Ma'arif, 1988), Cet ke-1, h 15.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sebagian yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu<sup>28</sup>.

Sebagaimana penjelasan diatas, didalam Islam istilah sewa atau upah dikenal dengan istilah ijarah. Menurut Hasbi Ash- Shiddiqie bahwa ijarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.<sup>29</sup> Manfaat terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seorang pekerja bangunan, tukang tenun, penjahit. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti para pekerja.

Para ulama fiqih juga mengemukakan tentang upah, adalah sebagai berikut: 30

- a. Ulama Hanafiah, ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat dengan imbalan.
- b. Ulama asy-Safi'iyah ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c. Ulama Malikiyah dan hanabilah, ijarah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

<sup>28</sup> .Pusat Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 947.

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada,2008), hlm. 115

<sup>30</sup> Nasrun Hareon, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228-229



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut dewan penelitian perupahan nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.<sup>31</sup>

Batasan tentang upah menurut dewan penelitian pengupahan adalah sebagai berikut:” upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kerja <sup>untuk</sup> suatu untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak lagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah di tetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan-peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pembri kerja dan penerima kerja.<sup>32</sup>

Sedangkan dalam undang-undang ketenaga kerjaan disebutkan bahwa upah adalah hak buruh/pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai <sup>imbalan</sup> dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh/pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi buruh/pekerja dan keluarganya atas suatu

<sup>31</sup> Veith Rivai, *Islamic Human Capital Dari Tiori Ke Praktek Menajmen Sumber Daya Islami*, (jakarta : Rajawali pers, 2009), hlm. 799

<sup>32</sup> Undang-undang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (pasal 1 angka 30 undang-undang No. 13 tahun 2003). Dari segi imbalan, *ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam *ijarah*, objeknya adalah manfaat dari benda, oleh karena itu, tidak di perbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat. Demikian pula tidak dibolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat, melainkan benda.<sup>33</sup>

#### 4. Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja. Pengertian tenaga kerja ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja. Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah sedang bekerja, sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.<sup>34</sup>

Menurut undang-undang Nomor 14 tahun 1969 pasal 1 tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 317.

<sup>34</sup> Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm. 4

<sup>35</sup> Zainal asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 42

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian tenaga kerja menurut undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka 3 tentang ketenagakerjaan. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>36</sup> Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaan pada umumnya sebagaimana ditulis oleh payaman J. Simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja atau manpower adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.<sup>37</sup>

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak diekplotasi oleh manusia dan diolah oleh buruh.<sup>38</sup>

## B. Upah

### 1. Indikator Upah

Adapun indikator sistem pengupahan terdiri dari :<sup>39</sup>

#### a. Menurut lamanya kerja

Sistem upah menurut lamanya kerja juga disebut sebagai upah berdasarkan waktu, yaitu pembayaran upah berdasarkan suatu anggapan bahwa dalam waktu yang sama, maka produktivitas adalah

<sup>36</sup>Zaeni Asyhadie, hukum kerja: *Hukum Tenaga Kerja Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007 ), h. 21.

<sup>37</sup>Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 17.

<sup>38</sup> Afsalur Rahman, *Loc. Cit. h. 248*

<sup>39</sup> Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003, Hlm. 140



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama, anggapan ini jelas kurang tepat, karena belum tentu tiap karyawan dalam waktu yang sama memperoleh hasil yang sama. Hal ini dapat saja disebabkan kemampuan karyawan yang berbeda, serta pengaruh lainnya yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Dengan sistem ini, umumnya karyawan yang mempunyai prestasi kerja yang baik menyesuaikan dengan karyawan lain yang prestasinya lebih lambat atau lebih rendah.

b. Menurut Banyaknya Produk

Sistem upah ini didasarkan pada kemampuan dari masing - masing karyawan dalam berprestasi serta memberikan kesempatan pada karyawan yang mempunyai kemampuan kerja untuk meningkatkan produktifitas kerjanya.

c. Menurut Lamanya Dinas

Upah yang diperhitungkan lamanya dinas ini didasarkan pada masa kerja seorang karyawan dalam perusahaan. Pemberian upah ini bertujuan untuk memupuk kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Pada umumnya pemberian upah ini beranggapan bahwa semakin meningkat pula pengalaman dan kemampuan karyawan tersebut dalam menentukan tugasnya, tetapi upah yang berdasarkan pada ukuran pengalaman dan kesetiaan serta kemampuan karena masa kerja seorang karyawan belum tentu menjamin prestasi kerjanya. Hal ini disebabkan mungkin selama bekerja pada perusahaan karyawan tersebut acuh tak acuh terhadap pekerjaannya atau mungkin juga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karyawan telah lanjut usia, sehingga walaupun telah lama bekerja atau dinas dalam perusahaan produktivitas kerjanya rendah.

d. Menurut kebutuhan

Sistem upah ini berusaha menyesuaikan dengan besarnya kebutuhan karyawan beserta keluarganya. Sistem upah ini berdasarkan pada suatu anggapan bahwa apabila kebutuhan karyawan dan keluarganya terpenuhi, maka diharapkan karyawan tersebut dapat mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi sebenarnya anggapan ini kurang benar. Hal ini dapat disebabkan oleh kebutuhan seseorang sangat relatif dan bervariasi dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan karyawan tersebut sangat terbatas, sehingga dengan sistem upah minimupun belum tentu dapat menjamin meningkatnya produktivitas karyawan.

## 2. Dasar Hukum Upah

Telah diuraikan bahwa *Al-Ijarah* adalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia, sebab itu fuqaha telah menilai bahwa *ijarah* ini suatu hal yang diperbolehkan, karena perbuatan tersebut adalah merupakan salah satu bentuk tolong menolong antara sesama manusia.

Dalam syari'at islam, landasan pengupahan kaum buruh atas jasa diberikan majikannya dilihat dalam dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an Hadist maupun ijma' ulama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Dasar Hukum Al-Quran

Adapun dasar hukum ijarah ini dapat dilihat ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamukerjakan”<sup>40</sup>

#### Surat az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: apakah mereka yang membagi- bagi rahmad tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmad tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>41</sup>

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum ijarah

<sup>40</sup> Depag.RI, *Al-Quran dan terjemahannya*. h. 37.

<sup>41</sup> *Ibid*. h. 489.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan kepada ayat-ayat Al- Qur'an surat Al-Qashash ayat 26 sebagai berikut :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ

Artinya : “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

#### b. Dasar Hukum Hadist

- 1) Al- Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Nabi saw bersabda :

إِحْتَجِمْ وَاعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”.<sup>42</sup>

- 2) Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Artinya: “Berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya “ (HR. Ibnu Majah)<sup>43</sup>

Maksud hadits diatas berikanlah upah kepada seseorang itu pada waktu berakhirnya pekerjaannya dan jangan menangguhkannya. Dengan adanya dasar hukum yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa ijarah merupakan sesuatu yang dibolehkan. Masalah pembayaran upah harus jelas sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga,

<sup>42</sup> Imam Bukhori, *Shahih Bukhari Kitab al-Ijarah*, (Bairut : Dar Al Fikr, 1995), jilid 2,

<sup>43</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar Al-Fikr,1995), Jilid 2, hlm. 20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan mendahului upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian kalau ternyata sudah diperjanjikan, maka harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.

Dalam hukum positif juga diatur tentang pengupahan diantaranya, dalam undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi : “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan demikian upah yang harus diterima oleh buruh atau pekerja atas jasa yang diberikan haruslah berupa upah adil dan yang wajar.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah ini, harus orang yang memiliki kecakapan bertindak, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dalam hal ini para ulama berpendapat, bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ditentukan oleh hal-hal yang bersipat fisik dan kejiwaan, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang suatu perbuatan yang sah.

### 3. Syarat Pelaksanaan Upah

Mengenai penyerahan upah ini secara terperinci dalam Islam telah memberikan pedoman yaitu selesainya pekerjaan dan mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat yaitu mempercepat pembayaran upah pekerjaan.

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menagguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut misalnya orang yang menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam masyarakat Islam ditetapkan mulai negosiasi antara pekerja pengusaha dan Negara, serta pemerintah mempunyai peran penting dalam penetapan upah agar diantara pihak tidak terjadi penganiayaan, dalam Islam dijelaskan bahwa antar pekerja dan pengusaha dilarang berbuat aniaya, keadilan mereka harus ditegakkan.

Pengusaha harus terlibat pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya, dalam pelaksanaan pembayaran upah yang merupakan hak pekerja, syariat Islam telah memberikan pedoman yaitu apabila:

- a. Selesai bekerja.
- b. Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk barang. Apabila terdapat kerusakan pada 'ain (barang) sebelum, dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, ijarah menjadi batal.
- c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masaitu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- d. Mempercepat dalam bentuk pelayanan dan kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan ijarah (perjanjian kerja) yaitu:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, tidaklah boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas keterpaksaan.
- 2) Didalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik dari pihak Mu'jir dan Muta'jir.
- 3) Sesuatu yang diakadkan harus sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud.
- 4) Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi ijarah adalah sesuatu yang mubah.
- 5) Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah berupasesuatu yang bernilai yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.<sup>44</sup>

#### 4. Perbedaan Tingkat Upah

Dalam kehidupan ini, banyak kita jumpai perbedaan tingkat upah, perbedaan upah bisa kita lihat antara pekerja intelektual dan pekerja kasar, diantara perkerja-pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Adakalanya perbedaan upah itu sangat mencolok sekali. Ada upahnya hanya untuk hidup, ada yang memungkinkan suatu kehidupan yang mewah. Ada beberapa faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah yaitu:

- a. Perbedaan jenis pekerjaan
- b. Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan
- c. Pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2013), hlm. 35

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Ketidak sempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja<sup>46</sup>

Dalam beberapa hal, hukum Islam mwngakui adanya perbedaan upah diantara tingkat pekerjaan. Karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nissa' ayat 32:

وَلَا تَمْتَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Berdasarkan ayat diatas bahwa penentuan upah pekerja didasarkan atas kemampuan atau propesionalisme<sup>47</sup> dan pendekatan dengan Al-Qur'an dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan dan bakat ini merupakansalah satu sumbangan terpenting bagi kemajuan peradaban manusia.<sup>48</sup>

<sup>45</sup> Payaman P. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: LPFE 1998), hlm. 38

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 52

<sup>47</sup> Abdul Hamid Mursi, *SDM Produktif: Pendekatan Sains*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1987), hlm. 156

<sup>48</sup> M. A Manan, *Ekonomi Islam: Tiori dan Praktek*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2000), hlm. 118

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak tanpa tekanan yang tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap dzalim terhadap yang lainnya.

Kedua belah pihak yang melakukan kontrak perjanjian (upah) dalam konteks ini diingatkan agar bersikap adil terhadap semua orang dalam bertransaksi, agar tidak merugikan orang lain dalam kepentingan pribadinya. Merugikan para pekerja berarti mereka tidak dibayar dengan satu bagian yang adil dan sah dari produk bersamanya menurut proporsi kerja mereka, sedangkan merugiakan majikan berarti mereka dipaksa untuk membayar upah para pekerja melebihi yang mereka mampu usakan.

Dalam Islam dikenal beberapa tingkat upah yaitu:

a. Tingkat upah minimum

Para pekerja dalam hubungannya dengan majikan, berada dalam posisi tawar-menawar yang sangat lemah. Selalu ada kemungkinan kepentingan para pekerja tidak akan dilindungi dengan baik, mengingat posisinya yang lemah itu, Islam memberikan perhatian yang besar dalam melindungi hak para pekerja dari segala gangguan yang dilakukan majikannya. Islam mewajibkan para majikan agar menetapkan upah minimum yang harus dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya, termasuk makanan, pakaian,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perumahan dan lain-lain agar para pekerja dapat menikmati taraf hidup yang layak.<sup>49</sup>

#### b. Tingginya Upah

Memeang benar bahwa Islam tidak akan membiarkan jatuh dibawah tingkat upah minimum yang didasarkan pada kebutuhan pokok kelompok para pekerja. Namun, Islam juga tidak memberikan upah tingkat rendah.

### 5. Sistem Pembayaran Upah

Menurut hukum positif penetapan upah, terdapat berbagai sistem pembayaran upah, pembayaran itu sebagai berikut :<sup>50</sup>

#### a. Sistem upah jangka waktu

Menurut sistem pembayaran ini, upah ditetapkan menurut jangka waktu buruh melakukan pekerjaan, dimana untuk tiap-tiap jam diberikan upah perjam, untuk tiap saat hari bekerja diberikan upah harian, untuk upah tiap minggu diberikan upah mingguan, untuk setiap bulan diberikan upah bualanan dan sebagainya. Dalam sistem pengupahan ini, buruh tidak perlu melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa oleh sebab itu dampak negatif dari sistem ini adalah buruh tidak bekerja dengan giat.

#### b. Sistem upah potongan

Sistem ini, sering dipakai untuk mengganti system upah jangka waktu apabila hasil kerja tidak memuaskan, karena upah ini hanya bisa

<sup>49</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta: yayasan swarna bhumi, 1997), hlm. 297

<sup>50</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, (Mataram: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 72.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkan bila dapat diukur hasil pekerjaan itu dengan ukuran tertentu, misalnya jumlah banyak, jumlah berat, jumlah luasnya hasil pekerjaan buruh tersebut. Maka sistem pengupahan ini tidak dapat dipakai pada suatu perusahaan.

c. Sistem upah pemupakatan

Sistem upah ini pada dasarnya adalah upah potongan yaitu upah untuk hasil, pekerjaan tertentu, misalnya pada pembuatan jalan, pekerjaan memuat membongkar dan mengangkut barang-barang dan sebagainya, tapi upah ini bukan diberikan kepada buruh masing-masing melainkan kepada sekumpulan buruh yang telah bersama-sama melakukan pekerjaan itu.<sup>51</sup>

d. Sistem skala upah buruh

Adanya pertalian antara upah dengan harga penjualan hasil perusahaan. Cara pengupahan ini dapat dijalankan oleh perusahaan yang harga barang hasilnya untuk sebagian besar atau seluruhnya tergantung pada harga pasaran di luar negeri, upah akan naik atau turun menurut naik turunnya harga barang perusahaan itu. Cara pengupahan seperti ini banyak terdapat pada perusahaan pertambangan dan pabrik baja di Inggris. Dalam pengupahan ini bisa terjadi perselisihan apabila harga barang terus menurun yang pada akhirnya mengakibatkan buruh yang sudah terbiasa dengan gaji yang besar.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 73

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Upah indeks

Upah indeks adalah upah yang naik turun menurut naik turunnya angka indeks biaya penghidupan, tetapi naik turunnya upah ini tidak akan mempengaruhi nilai riil dari upah.

f. Sistem upah pembagian keuntungan

Maksudnya disamping upah yang diterima oleh buruh pada waktu tertentu pada sistem ini, maka pada penutupan buku tahunan bila perusahaan mendapat keuntungan yang besar kepada buruh diberikan sebagian dari keuntungan itu.<sup>52</sup>

g. Upah sistem hasil(output)

Dalam sistem ini, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti perpotong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

h. Upah sistem borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Upah borongan diberikan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan pihak yang memberikan pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Pembaharuan*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 92-93.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 807.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Upah dalam Pekerjaan Ibadah

Para ulama berbeda sudut pandang dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah.

Hanafi berpendapat bahwa *Al-Ijarah* dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk sholat, puasa, haji, atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa, menjadi muadzin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.

Perbuatan seperti adzan, sholat, puasa, haji, membaca al-Qur'an, dan dzikir adalah tergolong perbuatan untuk taqarrub kepada Allah, karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah SWT.

Sebagai ilustrasi sering kita jumpai di beberapa daerah di Indonesia apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggal wafat meminta kepada santri atau tetangga untuk membaca al-Qur'an di rumah atau di makam selama tiga malam, tujuh malam, atau bahkan ada yang empat puluh malam. Setelah selesai membaca al-Qur'an dan zikir-zikir tertentu pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah atas jasa tersebut.<sup>54</sup>

Dijelaskan Hendi Suhendi dalam buku *Fiqh Muamalah*, "para ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah dari aktivitas yang dianggap sebagai perbuatan baik." Pengajar al-Qur'an, guru agama di sekolah ataupun

<sup>54</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 280-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditempat lain, dibolehkan mengambil atau menerima upah, atau jasa yang diberikannya, karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan keluarganya, mengingat mereka tidak mempunyai waktu untuk melakukan aktivitas lain selain aktivitas tersebut.

### Upah Menurut Ekonomi Islam

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.<sup>55</sup>

#### 1. Makna Keadilan dalam Pengupahan

Keadilan ialah perlakuan sama yang didapat seseorang dari orang lain dengan hak dan derajat yang sama pula. Perkataan adil berasal dari bahasa arab '*adlun* yang berarti insaf, keinsafan, yang menurut etika baik dan lurus. Bahasa latin diistilahkan dengan *justicia*, yang berarti keisafan, tidak berat sebelah, seimbang dan sama rata.<sup>56</sup>

WJS. Poerwadarminta yang dikutip pada buku pengantar Studi Etika karangan yatimin abdullah memberikan pengertian adil sebagai berikut :

- a. Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil; putusan itu di anggap adil;

<sup>55</sup>Upah dalam islam, artikel di akses pada 15 juli 2017 <http://wid11.blogspot.com/203/04/upah-dalam-islam.html>.

<sup>56</sup> Jusmaliani, *Pengelola Sumber Daya Insyani*, 1997

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil; masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan adil.<sup>57</sup>

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku disemua wilayah kegiatan manusia, baik dibidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sebenarnya sistim ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, yang meliputi seluruh aspek dasar perekonomian seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran.<sup>58</sup>

Maksud adil dapat kita lihat dari pandangan Yusuf Qardhawi dalam bukunya, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Ia menjelaskan, “sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau mengalkan yang haram. Namun jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upah), karena setiap hak diiringi kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam ‘peraturan kerja’ yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.”<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Yatimin Abdullah, *Pengantar Stady Etika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 538-539.

<sup>58</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sisten Ekonomi Islam*, ( Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014), hlm. 45

<sup>59</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: AL-Mujtahadah Press, 2014), hlm 76



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Makna Layak dalam Pengupahan

- a. Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan

Hal ini berarti upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar. Jika ditinjau dari hadist yang diriwayatkan oleh abu Dza bahwa Rasulullah SAW bersabda :

هُم إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ أَيْدِيَكُمْ فَأُطْعَمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبَسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تَلْفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَفْتُمُوهُمْ فَاعْيُونُهُمْ

Artinya: Mereka (para budak dan pelayan) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka dibawah asuhanmu, sehingga barang siapa mempunyai saudara dibawah asuhannya (sendiri) dan meberikan pakaiyannya seperti apa yang dipakainya (sendiri), dan tidak membebaskan kepada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendak membantu mereka (mengerjakannya ) HR. Muslim<sup>60</sup>

Hadist diatas menjelaskan bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu : pangan (makanan), sandang (pakaiyan) dan papan (tempat tinggal). Hadist diatas juga menetapkan bahwa : pertama, Majikan dan pekerja harus saling menganggap saudara seiman dan bukan sebagai tuan dan budak.. kedua, bahwa majikan seharusnya berada pada tingkat yang sama dengan pekerjaannya, palin tidak dalam soal kebutuhan mendasar. Ketiga, bahwa seorang pekerja tidak boleh dibebani dengan tugas yang terlalu berat atau sulit, yaitu tugas yang melampayi kemampuanya atau

<sup>60</sup> CD-Room, *Mausu'ah al-Hadits asy Syarif Kutubuh Shahih Muslim Kitab al- Aiman* bab 10 hadits ke 4403.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin membuat berada dalam kesulitan yang besar dalam mengerjakannya.<sup>61</sup>

- b. Layak sesuai dengan pasaran.

Hal ini dapat dilihat pada makna yang tersirat dalam Q.S Asy-Syu'araa' ayat 183 yang berbunyi :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ

Artinya : “*dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuaka bumi dengan membuat kerusakan*”.

Ayat diatas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dngan cara menguragi hak-hak yang seharusnya di perolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah membayar upah seseorang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Dengan demikian hubungan antara perusahaan dengan majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas pekerjaan formal saja melainkan pekeja merupakan bagian dari keluarga pegusaha.

### 3. Makna Kebajikan dalam Pengupahan

Sedangkan kebajikan berarti menuntut jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. Penganiayaan

<sup>61</sup> Afzalurrahman, *op.cit*, h. 298-299.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh. Sedangkan yang dimaksud penganiayaan terhadap pengusaha adalah mereka yang dipaksa buruh untuk membayar upah buruh melebihi dari kemampuan mereka.<sup>62</sup>

Tentang cara penentuan upah, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (musamma) jika ada, yang dapat diajukan kepada kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahuhi (*tsaman musamma*) akan diperlukan sebagai harga yang setara.<sup>63</sup>

Islam menawarkan solusi yang sangat tepat, baik mengenai masalah upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan pekerja maupun majikan. Para buruh mendapatkan upah yang layak tanpa melanggar hak-hak majikannya yang sah. Majikan tidak boleh berlaku sewenag-wenang terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan bagian hak pekerja yang sah, sementara para pekerja itu juga tidak diberi seluruh dividen nasional sehingga mengurangi hak yang sah dari majikannya. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak tanpa tekanan yang tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap dzalim terhadap yang lain.<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Upah Dalam Islam, artikel diakses pada tgl, 21 mei 2017 dari <http://wid11.blogspot.com/203/04/upah-dalam-Islam.html>.

<sup>63</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 257.

<sup>64</sup> Afzalurrahman, *Op. Cit*, h. 296



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan/manfaat tenaga seseorang. Berbeda dengan pandangan kapitalis dalam menentukan upah kepada seorang pekerja dengan menyesuakannya dengan biaya dalam batas minimum. Sebaliknya, mereka akan mengurangnya apabila beban hidupnya berkurang. Oleh karena itu, upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya, tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga seseorang dan masyarakat.

Sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari otoritas sistem Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, paradigma dasar yang digunakan untuk membangun pengaturan urusan rakyat adalah akidah dan hukum syariat. Sistem ekonomi Islam adalah bagaimana cara mendapatkan kekayaan, Islam telah menetapkan bahwa masalah mendasar ekonomi adalah bagian individu bisa mendapatkan alat pemuas bagi kebutuhannya, cara memproduksi barang dan jasa, peningkatan efisiensi, dan produktivitas kerja dan sebagainya.<sup>65</sup>

Dalam uraian konsep diatas, maka dapat dijelaskan bahwa upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menetapkan upah dalam dimensi dunia, konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan, dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itulah konsep moral diletakkan

---

<sup>65</sup> Endah Kartikasari, *Membangun Indonesia tanpa Pajak dan Hutang*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), hlm. 45.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada kotak paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai.

Dimensi upah di dunia dicirikan oleh dua hal, yaitu adil dan layak. Adil bermakna bahwa upah yang diberikan harus jelas, transparan dan proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berbeda dibawah pasaran, aturan manajemen upah ini perlu kedudukan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan kariawannya di perusahaan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Veithzal Rivai, *Loc. Cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Dari uraian penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan mengenai sitem pembayaran upah buruh bongkar muat sawit di desa pardomuan kecamatan angkola selatan kabupaten tapanuli selatan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sistem pembayaran upah pada buruh bongkar muat sawit di Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan ini, upah sudah sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan, dilihat dari hasil jawaban responden dengan jumlah 25 orang atau 100% yang mengatakan ia sesuai upah dengan tenaga yang dikeluarkan. Namun terkadang sistem pembayaran upahnya masih kurang tepat waktu karena masih ada tanggapan responden sebanyak 10 orang atau 33% yang mengatakan pembayaran upahnya tidak tepat waktu.
2. Adapun tinjauan ekonomi syariah tentang sistem pembayaran upah buruh bongkar muat sawit di dea pardomuan kecamatan angkola selatan kabupaten tapanuli selatan, kesesuaian upah dengan tenaga yang dikeluarkan sudah sesuai dengan ekonomi syari'ah. Namun pada saat pembayaran upah belum sepenuhnya dibayar dengan tepat waktu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan-kesimpulan yang diambil berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran yang kiranya dapat dilakukan dan bermanfaat bagi para buruh dan pemberi kerja, yaitu :

1. Kepada buruh

Sebelum melakukan kesepakatan kerja, buruh diharapkan mengetahui perjanjian tentang upah sebelum melakukan pekerjaan dan yang di terapkan oleh pemberi kerja, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak.

2. Kepada sipemberi kerja

Diharapkan bisa menganalisa kebutuhan buruh agar mampu menentukan upah yang layak diberikan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga buruh dan bisa menyesuaikan beban kerja terhadap upah yang akan di terima oleh buruh.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Mursi, *SDM Produktif: Pendekatan Sains*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1987)
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010)
- Atzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta: yayasan swarna bhumi, 1997)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010)
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: AL-Mujtahadah Press, 2014)
- Ali Mukti Ritonga (Toke Sawit), *Wawancara*, Pardomuan Tanggal 22 Oktober 2018
- Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- CD-Room, *Mausu'ah al-Hadits asy Syarif Kutubuh Shahih Muslim Kitab al-Aiman bab 10 hadits ke 4403*.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004)
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004)
- Eddy Pharasta, *Sistem Informasi Geografis: Konsep-konsep Dasar (Prespektif Geodesi & Geomatika)*, (Bandung: Informatika Bandung, 2009)
- Endah Kartikasari, *Membangun Indonesia tanpa Pajak dan Hutang*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2010)
- Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2013)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Himsar Siregar, Kepala Lingkungan 4, *Wawancara*, Pardomuan, 22 Oktober 2018
- Hutahaean , Jeperson, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014)
- Hutahaean , Jeperson, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014)
- Henu Abidin, *Radda al-Muktar*, (Bairut : Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1994), jilid 9
- Henu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1995), Jilid 2



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Bukhori, *Shahih Bukhari Kitab al-Ijarah*, (Bairut : Dar Al Fikr, 1995), jilid 2

Iusmaliani, *Pengelola Sumber Daya Insyani*, 1997

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008)

M. A Manan, *Ekonomi Islam: Tiori dan Praktek*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2000)

M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Statistik 1*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)

Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta, pustaka Azzam, 2007 Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta : Erlangga, 2012)

Muhammad Sharif Chaudhry, *Sisten Ekonomi Islam*, ( Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014)

Nasrun Hareon, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta. Gaya Media Pratama, 2007)

Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)

Payaman P. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: LPFE UI,1998)

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Said Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid1 Ahli Bahasa H.Kamaluddin A. Marsuki (Bandung :Alma'arif, 1988), Cet ke-1

Said Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid1 Ahli Bahasa H.Kamaluddin A. Marsuki, (Bandung: Alma'arif, 1988), Cet ke-1

Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003)

Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenaga Kerjaan*,(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003)

Tukiran Taniredja, Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: Alfabeta,2014)





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

Upah dalam islam, artikel di akses pada 15 juli 2017 <http://wid11.blogspot.com/203/04/upah-dalam-islam.html>.

Upah Dalam Islam, artikel diakses pada tgl, 21 mei 2017 dari <http://wid11.blogspot.com/203/04/upah-dalam-Islam.html>.

Veith Rivai, *Islamic Human Capital Dari Tiori Ke Praktek Menajmen Sumber Daya Islami*, (jakarta : Rajawali pers, 2009)

Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital dari Teori ke Praktek Menajmen Sumber Daya Islami*, (Jakarta : Rajawali pers, 2009)

Yatimin Abdullah, *Pengantar Stady Etika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

Yusuf, Sri Dewi. "Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Ulum Volume. 10, Nomor 2, Desember 2010*, hlm.313

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, (Mataram: PT. Raja Grafindo, 2007)

Zaeni Asyhadie, hukum kerja: *Hukum Tenaga Kerja Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007 )

Zainal asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ANGKET PENELITIAN

### SISTEM PEMBAYARAN UPAH BURUH BONGKAR MUAT SAWIT DI DESA PARDOMUAN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH

#### KETERANGAN :

- a. Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih atas kesediaan bapak/ibu dalam membantu penulis dengan mengisi angket ini yang berguna untuk menyelesaikan tugas akhir.
- b. Saya berharap pertanyaan benar-benar dipilih sesuai dengan tanggapan saudara dengan kenyataan yang ada dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

#### IDENTITAS DIRI

Nama :

Usia :

Pendidikan :

Petunjuk

Pilih salah satu jawaban yang dianggap benar sesuai pemikiran dan pendapat saudara dengan memberi tanda (X) pada masing-masing pertanyaan.

1. Sudah berapa lama bapak/ibuk bekerja sebagai bongkar muat sawit ?
  - a. Kurang dari 1 (satu) tahun
  - b. 1 sampai 2 tahun
  - c. Lebih dari 2 (dua) tahun
2. Apakah upah yang diberikan dapat membantu perekonomian keluarga ?
  - a. Iya
  - b. Kurang
  - c. Tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

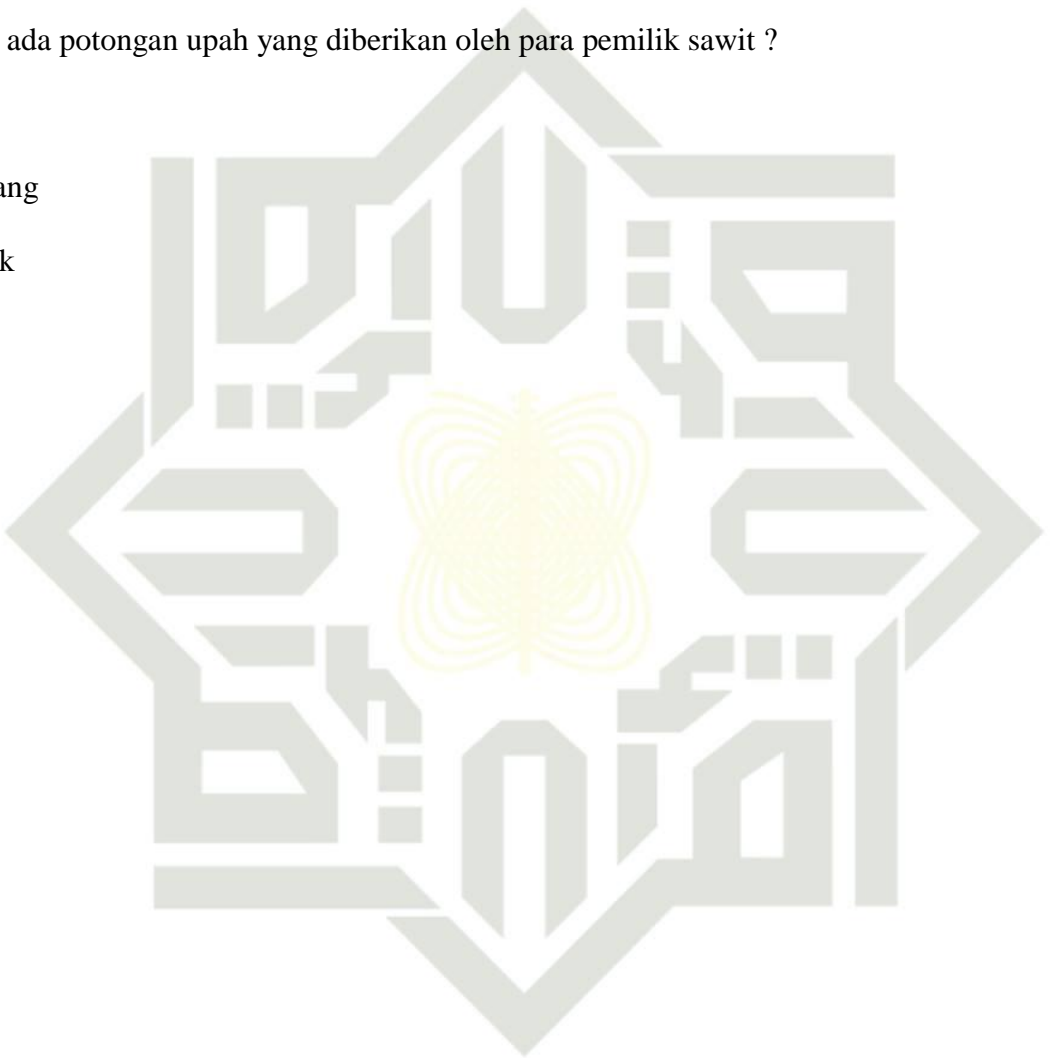
3. Apakah upah yang bapak/ibu terima tepat waktu ?
  - a. Iya
  - b. Kadang-kadang
  - c. Tidak
4. Apakah upah yang bapak/ibu terima sama setiap bulannya ?
  - a. Iya
  - b. Kadang-kadang
  - c. Tidak
5. Apakah ada tambahan bonus yang bapak/ibu terima ?
  - a. Iya
  - b. Kadang
  - c. Tidak
6. Apakah upah yang bapak/ibu terima sesuai dengan kesepakatan atau akad ?
  - a. Iya
  - b. Kadang
  - c. Tidak
7. Apakah upah yang bapak/ibu terima berbeda dengan karyawan lain ?
  - a. Sama
  - b. Kadang
  - c. Tidak
8. Apakah pernah bapak/ibu tidak diberi upah pada saat bongkar muat sawit ?
  - a. Pernah
  - b. Kadang
  - c. Tidak



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Apakah upah yang bapak/ibu terima dapat membayar sekolah anak ?
  - a. Iya
  - b. Kadang
  - c. Tidak
10. Apakah ada potongan upah yang diberikan oleh para pemilik sawit ?
  - a. Iya
  - b. Kadang
  - c. Tidak



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Gambar 1 : penyebaran angket dan sekaligus wawancara kepada buruh bongkar muat sawit desa pardomuan



Gambar 2 : wawancara langsung dengan bapak Ali Mukti Ritonga sebagai agen (toke) sawit



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 : wawancara langsung dengan bapak Ahmad sebagai agen (*toke*) sawit





## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **"SISTEM PEMBAYARAN UPAH BURUH BONGKAR MUAT SAWIT DI DESA/KELURAHAN PARDOMUAN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH"** yang ditulis oleh:

Nama : **Sabar Hasibuan**  
NIM : 11425100611  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Wahidin, M.Ag**

Sekretaris  
**Nuryanti, SE., M.Sy**

Penguji I  
**Ahmad Fauzi, SHL., MA**

Penguji II  
**Bambang Hermanto, M.Ag**

Kabag Tata Usaha  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. N A M A                         | : Sabar Hasibuan  |
| 2. NOMOR MAHASISWA                 | : 11425100611   |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN           | : Sistem pembayaran upah buruh bongkar muat sawit<br>ditinjau menurut ekonomi syariah (studi kasus di desa<br>pardomuan kecamatan angkola selatan kabupaten<br>tapanuli selatan |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan          | : Senin / 20 Mei 2019   |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah | :   |
| a. Judul                           | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan   |
| b. Latar Belakang Masalah          | : Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan   |
| c. Permasalahan                    | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi<br>jelas  |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan  |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada)    | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan  |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada)    | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam  |
| g. Metode Penelitian               | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan   |
| h. Daftar Pustaka                  | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah<br>yang diteliti  |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya  
disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Dr. H. Heri Sunandar, M.cI

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar  
Dikonsultasikan dengan WD I

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



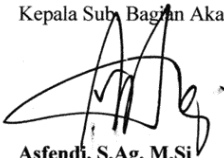
KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARIAH AND LAW  
Jl. H. R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id


**LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul: **Sistem Pembayaran Upah Bongkar Muat Sawit Di Desa  
Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau  
Menurut Ekonomi Syariah**, ditulis oleh saudara:

Nama : Sabar Hasibuan  
NIM : 11425100611  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tgl. : Senin, 20 Mei 2019  
Narasumber : Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub Bagian Akademik  
  
**Asfendi, S.Ag, M.Si**  
NIP. 19610918 1988 1 002.

Pekanbaru,  
Narasumber  
  
**Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL**  
NIP 19660803 199303 1 004

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5927/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SABAR HASIBUAN  
N I M : 11425100611  
Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah Lulus :

**UJIAN KOMPREHENSIF**

Yang diselenggarakan pada tanggal : **3 JULI 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 22 Juli 2019

Dekan,

  
DR. Drs. H. Hajar, M.Ag  
NIP. 195807121986031005

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor :  
Lamp : 1 (satu) rangkap  
Perihal : **Nilai Skripsi**

Pekanbaru, 2019

Kepada  
Yth.Sdr. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Denganhormat,

Memenuhi maksud Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Nomor :Un.04/F.1.1/PP.01.1/591/2019, tanggal 4 November 2019 perihal yang sama pada pokok surat, dengan ini kami kirimkan sebagai berikut :

N a m a : SABAR HASIBUAN  
N I M : 11425100611  
Jurusan : EKONOMI SYARIAH  
Nilai Skripsi : Nilai Angka : 80 Nilai Huruf : A -

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

W a s s a l a m  
Dosen Pembimbing

HENRIZAL HADI, Lc,MA

#### Keterangan Nilai :

Nilai A ; Bila Angka Antara 85-100  
Nilai A-; Bila Angka Antara 80 – 84  
Nilai B+; Bila Angka Antara 75-79  
Nilai B; Bila Angka Antara 70-74  
Nilai B-; Bila Angka Antara 65-69  
Nilai C+; Bila Angka Antara 60-64  
Nilai C; Bila Angka Antara 55-59  
Nilai D; Bila Angka Antara 50-54  
Nilai E; Bila Angka Antara 0-49

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6705/2019  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 19 Agustus 2019

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SABAR HASIBUAN  
NIM : 11425100611  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : XI (Sebelas)  
Lokasi : Kelurahan/Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan  
Kabupaten Tapanuli Selatan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:SISTEM PEMBAYARAN UPAH BURUH BONGKAR MUAT SAWIT DI DESA  
PARDOMUAN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan  
  
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 0056

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480  
Fax. (061)4153148 Medan 20119

### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070.1247 /BKB.P

1. Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
2. Menimbang : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/2543 Tanggal 20 Agustus 2019 Perihal Rekomendasi penelitian.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA

- a>Nama : Sabar Hasibuan
- b.Alamat : Pekanbaru
- c.Pekerjaan : Mahasiswa
- d.Nip/Nim/KTP : 11425100611
- e.Judul : Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit Di Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam
- f.Lokasi/Daerah : Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan
- g.Lamanya : 3 (tiga) Bulan
- h.Peserta : Sendiri.
- i.Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/Riset/Penelitian/KKN dimaksud dengan catatan :
  - a. Untuk pengawasan surat ijin yang dikeluarkan oleh Balitbang Provinsi kami diberi tembusannya.
  - b. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud dan yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.
  - c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara.
4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir 2 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka Rekomendasi ini tidak berlaku.
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan ijin Penelitian.

Medan, 30 Agustus 2019

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA  
KABID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL

BUDIANTO TAMBUNAN, SE, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640526 199803 1 002

### Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
2. Bupati Tapanuli Selatan Up Ka Badan Kesbangpol
3. Ka. Balitbang Provsu
4. Dekan Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
5. Pertiagal

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN TAPANULI SELATAN  
 Jl. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK  
 Kode Pos: 22742 Telepon (0634) 4345023 Faks. (0634) 4345035  
 E-mail: ptsppmkabtapsel@yahoo.co.id Website : ptsp.tapselkab.go.id

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**  
**Nomor : 503/ 44 /SKIP/2019**

Sehubungan dengan Surat Saudara **Budianto Tambunan, SE., M.Si** selaku Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070-1247/BKB.P tanggal 30 Agustus 2019 tentang Rekomendasi Penelitian di Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 503/097/BKB-POL/2019 tanggal 05 September 2019 perihal Rekomendasi Izin Penelitian, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak merasa keberatan atas Penelitian tersebut sepanjang mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini kami dapat memberikan izin kepada :

|                  |   |
|------------------|---|
| Nama             | : <b>SABAR HASIBUAN</b>   |
| NIM              | : 11425100611   |
| Alamat           | : Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan   |
| Prodi            | : Ekonomi Islam   |
| Fakultas         | : Syariah dan Hukum   |
| Judul            | : Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit Di Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam |
| Penanggungjawab: | Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau   |

Untuk melaksanakan **Survey/Riset/Penelitian** di **Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.**

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. SKIP ini diberikan terhitung mulai tanggal diterbitkan sampai dengan 30 November 2019.
2. SKIP ini tidak memberikan jaminan Hak atau prioritas apapun kepada pemegang izin.
3. Sebelum mengadakan peninjauan pemegang Surat Keterangan Izin Penelitian harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.
4. SKIP ini tidak diperbolehkan dipindah tangankan/dialihnamakan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Kepada yang namanya tersebut di atas (bersangkutan) harus mentaati segala peraturan dan ketentuan Hukum yang berlaku, menjaga tata tertib dan keamanan serta menghindari pertanyaan lisan maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan, menghina Agama, Bangsa, Negara dan juga tidak mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Sesudah berakhirnya SKIP ini, pemegang SKIP wajib menyampaikan laporan tentang hasil penelitian secara tertulis kepada Bupati Tapanuli Selatan selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah berakhirnya peninjauan dengan tembusan kepada Instansi terkait.

UIN SUSKA RIAU





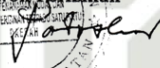
### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi dan pemegang SKIP tidak memberikan data yang sebenarnya, maka SKIP ini dapat dibatalkan dan dicabut serta pemegang SKIP tidak berhak menuntut kerugian apapun dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Demikian SKIP ini diperbuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada Instansi terkait diharapkan bantuan seperlunya dalam rangka pelaksanaan SKIP ini.

Dikeluarkan di Sipirok  
Pada tanggal 05 September 2019

an. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan  
Non Perizinan  
  
PADOY, S.Sos  
PENATA TINGKAT I  
NIP.19720525 199403 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tapanuli Selatan (Sebagai Laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Angkola Selatan;
4. Pertinggal.

UIN SUSKA RIAU



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN SIMARPINGGAN

Nomor : 070/ 429/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Simarpinggan, 05 September 2019  
Kepada Yth :  
Saudara Lurah Pardomuan Kec. Angkola Selatan

di-  
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 503/41/SKIP/2019 tanggal 05 September 2019 perihal Surat Keterangan Izin Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kecamatan tidak merasa keberatan dan memberikan Izin untuk melakukan Penelitian guna menyelesaikan Skripsi kepada :

Nama : SABAR HASIBUAN  
NIP : 11425100611  
Alamat : Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan  
Prodi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul Penelitian : " Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit di Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan dintinjau Menurut Ekonomi Islam"

Dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Surat Izin Penelitian ini diberikan terhitung mulai tanggal diterbitkan sampai dengan 30 Nopember 2019
- Surat Izin Penelitian ini tidak memberikan jaminan Hak atas prioritas apapun kepada pemegang izin
- Sebelum mengadakan peninjauan pemegang Surat Izin Penelitian ini harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Lurah.
- Surat Izin Penelitian ini diperbolehkan dipindah tangankan/dialihnamakan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pemerintah Kecamatan Angkola Selatan
- Kepada yang namanya tersebut diatas harus mentaati segala peraturan dan ketentuan Hukum yang berlaku, menjaga tata tertib dan keamanan serta menghindari pertanyaan lisan maupun tulisan yang menyinggung perasaan, menghina Agama, Bangsa, Negara dan juga tidak mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi dan pemegang tidak memberikan data yang sebenarnya, maka Surat Izin ini dapat dibatalkan dan dicabut serta pemegang surat Izin ini tidak berhak menuntut kerugian apapun dari Pemerintah Kecamatan Angkola Selatan.

Demikian di sampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

An. CAMAT ANGKOLA SELATAN  
SEKCAM  
MUSMULIADI S.Sos  
NIP. 19760806 199602 1 001

Tembusan :

- Bapak Bupati Tapanuli Selatan di Sipirok
- Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Selatan di Sipirok
- Saudara Sabar Hasibuan
- Pertinggal

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN TAPANULI SELATAN  
 Jl. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK  
 Kode Pos: 22742 Telepon (0634) 4345023 Faks. (0634) 4345035  
 E-mail: ptsppmkabtapsel@yahoo.co.id Website : ptsp.tapselkab.go.id

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**  
**Nomor : 503/ 41 /SKIP/2019**

Sehubungan dengan Surat Saudara **Budianto Tambunan, SE., M.Si** selaku Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070-1247/BKB.P tanggal 30 Agustus 2019 tentang Rekomendasi Penelitian di Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 503/097/BKB-POL/2019 tanggal 05 September 2019 perihal Rekomendasi Izin Penelitian, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak merasa keberatan atas Penelitian tersebut sepanjang mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini kami dapat memberikan izin kepada :

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nama            | : <b>SABAR HASIBUAN</b>   |
| NIM             | : 11425100611   |
| Alamat          | : Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan   |
| Prodi           | : Ekonomi Islam   |
| Fakultas        | : Syariah dan Hukum   |
| Judul           | : Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit Di<br>Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten<br>Tapanuli Selatan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam |
| Penanggungjawab | : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau   |

Untuk melaksanakan **Survey/Riset/Penelitian di Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.**

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. SKIP ini diberikan terhitung mulai tanggal diterbitkan sampai dengan 30 November 2019.
2. SKIP ini tidak memberikan jaminan Hak atau prioritas apapun kepada pemegang izin.
3. Sebelum mengadakan peninjauan pemegang Surat Keterangan Izin Penelitian harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.
4. SKIP ini tidak diperbolehkan dipindah tangankan/dialihnamakan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Kepada yang namanya tersebut di atas (bersangkutan) harus mentaati segala peraturan dan ketentuan Hukum yang berlaku, menjaga tata tertib dan keamanan serta menghindari pertanyaan lisan maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan, menghina Agama, Bangsa, Negara dan juga tidak mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Sesudah berakhirnya SKIP ini, pemegang SKIP wajib menyampaikan laporan tentang hasil penelitian secara tertulis kepada Bupati Tapanuli Selatan selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah berakhirnya peninjauan dengan tembusan kepada Instansi terkait.

UIN SUSKA RIAU





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi dan pemegang SKIP tidak memberikan data yang sebenarnya, maka SKIP ini dapat dibatalkan dan dicabut serta pemegang SKIP tidak berhak menuntut kerugian apapun dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Demikian SKIP ini diperbuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada Instansi terkait diharapkan bantuan seperlunya dalam rangka pelaksanaan SKIP ini.

Dikeluarkan di Sipirok  
Pada tanggal 05 September 2019

an. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
Kabid Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan  
Non Perizinan



PADOT, S.Sos  
PENATA TINGKAT I  
NIP.19720525 199403 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tapanuli Selatan (Sebagai Laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Angkola Selatan;
4. Pertinggal.

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN ANGKOLA SELATAN  
KELURAHAN PARDOMUAN**

Pardomuan, 13 September 2019

Nomor : 070 / IX / 2019  
Lampiran :  
Perihal : Izin Melakukan Penelitian

Kepada Yth:  
Bapak Kepala Kelurahan Pardomuan  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Camat Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan No. 070/ 429/2019 tanggal 05 September 2019. Perihal rekomendasi tentang Izin Melaksanakan Penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kelurahan Pardomuan tidak merasa keberatan dan memberikan Izin untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan Skripsi kepada:

Nama : **SABAR HASIBUAN**  
No. BP : 11425100611  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Jenjang : S1  
Alamat : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Akan melaksanakan izin penelitian:  
Lokasi : Desa/ Kelurahan Pardomuan  
Waktu : 09 September 2019  
Dalam Rangka : Penyusunan Skripsi  
Judul Penelitian : Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit di Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan judul penelitian
2. Dalam melakukan penelitian yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum dan sesudah penelitian kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.
5. Mengirimkan hasil laporan penelitian kepada Bupati Tapanuli Selatan C/q Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
An Kasi Masyarakat  
  
**OLOAN PULUNGAN**  
Nip. 19701005198909 1 001

Tembusan:

1. Bupati Tapanuli Selatan di Sipirok
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Selatan di Sipirok
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Soska Riau di Pekanbaru
4. Saudara Yang Bersangkutan
5. Pertinggal



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KELURAHAN PARDOMUAN

Pardomuan, 12 November 2019

Nomor : 070/429/XI/2019

Lampiran :

Perihal : Izin Telah Selesai Melaksanakan Penelitian

kepada Yth :

Bapak Kepala Kelurahan  
Pardomuan

Di  
Tempat

Sehubungan dengan surat ini dari Camat Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan no.070/429/2019 tanggal 05 September 2019, perihal rekomendasi tentang izin telah melaksanakan penelitian maka bersama ini disampaikan kepada saudara yang tersebut dibawah ini:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nama                       | : SABAR HASIBUAN  |
| No. Bp                     | : 11425100611   |
| Jurusan                    | : Ekonomi Islam   |
| Jenjang                    | : S1  |
| Alamat                     | : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau   |
| Lokasi                     | : Desa / Kelurahan Pardomuan  |
| Waktu                      | : 09 September 2019 S/D 09 maret 2020   |
| Tanggal selesai penelitian | : 12 November 2019  |
| Dalam rangka               | : Penyusunan Skripsi  |
| Judul penelitian           | : Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit<br>Didesa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan<br>Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Menurut<br>Ekonomi Syariah |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tidak boleh menyimpang dari topik dan judul penelitian
2. dalam melakukan penelitian yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum dan sesudah penelitian kepada pemerintahan setempat
3. mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat.
4. bila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.
5. mengirimkan hasil laporan penelitian kepada Bupati Tapanuli Selatan C/Q Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui  
Kepala Kelurahan  
Pardomuan

(H. HASWAT)

NIP. 19660416199007 1 001

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**JURNAL HUKUM ISLAM**

**Journal For Islamic Law**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www.jurnalhukumislam.com email: [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)  
 HP. 081275158167 – 085213573669

**SURAT KETERANGAN**

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **SABAR HASIBUAN**

NIM : **11425100611**

Program Studi: **EKONOMI SYARIAH**

Judul : *Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit Di Desa/Kelurahan  
 Pardomuan Kecamatan Angkaja Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan  
 Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*

Pembimbing : **Henrizal Hadi, LC., MA**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 21 Januari 2020

Pimpinan Redaksi

**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**  
 NIK. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU



## BIOGRAFI PENULIS

**SABAR HASIBUAN** lahir di Sisundung pada tanggal 17 Maret 1995 ia merupakan anak ke-2 dari Bapak Ahmad Hasibuan dan Ibu Masrida Harahap. Memiliki seorang kakak perempuan dan dua orang adik laki-laki. Kedua orang tuanya berdomisili di Desa/Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara. Tahun 2003 dia memulai pendidikan di SD Janji Matogu, setelah lulus dari sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikan ke MTS Al-Kautsar Sidakkal Padang Sidimpuan, setelah lulus dari MTS Al-Kautsar Sidangkal Padang Sidimpuan, ia melanjutkan pendidikan ke MAS Al-Ansor Padang Sidimpuan. Kemudian pada tahun 2014 ia melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, ia tercatat sebagai mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Pada tahun 2018 tepatnya semester VIII pada awal bulan Maret Sampai dengan bulan Desember 2019 penulis melakukan penelitian di beberapa usaha penimbangan sawit di Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatra Utara. Dengan judul penelitian “**SISTEM PEMBAYARAN UPAH BURUH BONGKAR MUAT SAWIT DI DESA/KELURAHAN PARDOMUAN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH**”, dibawah bimbingan **Henrizal Hadi, Lc., MA.**

Pada tanggal 26 Desember 2019, Penulis berhasil memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada sidang Sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan nilai memuaskan.

**Motto : “burung bisa terbang dengan sayapnya manusia bisa terbang dengan cita-citanya”**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.